KPU

PROVINSI NTB

PERJANJIAN

KINERJA

TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mars Ansori Wijaya, S.IP., MM
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi NTB

Selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

Nama : Suhardi Soud
Jabatan : Ketua KPU Provinsi NTB

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak **KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, Januari 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM	SEKRETARIS
PROVINSI NTB,	KOMISI PEMILIHAN UMUM
	PROVINSI NTB,
SUHARDI SOUD	MARS ANSORI WIJAYA, S.IP.,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujutnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang medistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi	100%
		Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan Informasi Hukum	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2.	Tersedianya Sistematika dan Standar pengiriman logistik Pemilu	Persentase satker yang mendistribusikan logistik pemilu/ pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
	Terwujudnya layanan pengadaan logistik pemilu	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%
	Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
	Terwujudnya Inventarisasi Logistik Pemilu	Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
3.	Tersedianya Peraturan Perundang-undangan, Rumusan dan rancangan Peraturan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan dana kampanye, Audit dana kampanye, Verifikasi Partai Politik, dan/atau anggota DPD yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
	Tersedianya Layanan Kepemiluan	Persentase pemangku kepentingan yang menerima Bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dan kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai	100%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		politik dan anggota DPD sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	
	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	95%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
4.	Terselenggaranya Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah rawan konflik/bencana	Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	11 KPU Prov/Kab /Kota
		Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	100%
		Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	100%
	Tersedianya Dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu sesuai dengan jadwal.	100%
	Terwujudnya Publikasi Informasi	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 Media Massa Nasional	10%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
	Terselenggaranya supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pilkada	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100%
5.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
	Meningkatkan Kapasitas SDM	Persentase Kesesuaian	95%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	yang Berkompeten	Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	
	Terpenuhinya Kebutuhan Oprasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	100%
	Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya	Jumlah dokumen riset kepemiluan	1 Dok
6.	Terwujudnya Layanan Perkantoran	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
	Terwujudnya Laporan Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Lap
	Terwujudnya Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Hibah Pemilihan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan	1 Dok
7.	Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih ditingkat Kecamatan melalui coklit dan sistem informasi	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%
	Terwujudnya laporan pelaksaan kegiatan dan analisis Capaian Kinerja	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	90%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah dokumen riset kepemiluan	1 Dok
	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	95%
		Persentasi fasilitasi kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	100%
8.	Terwujudnya Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	Persentase anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentasi Pegawai yang mendapat layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	97.5%
		Persentase pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai	1%
		Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
	Tersedianya Dokumen kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	80%
9.	Terwujudnya Layanan Perkantoran	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	90%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara dan material	100%
		Jumlah laporan barang milik	2 Lap

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	
	Terwujudnya Pengelolaan dan Penerapan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	75%
10.	Terwujudnya laporan dengan hasil tertentu	Nilai maturitas SPIP	Level 3
		Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	85%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
	Terwujudnya laporan hasil review laporan keuangan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kerja minimal B	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	**Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**	**Rp. 578.133.000,-**
2.	**Program Dukungan Manajemen**	**Rp. 5.741.014.000,-**
JUMLAH		**Rp. 6.319.147.000,-**

Mataram, Januari 2022

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NTB,

SUHARDI SOUD

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NTB,

MARS ANSORI WIJAYA, S.IP.,MM